

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keseimbangan dan Ketidakseimbangan Wilayah

2.1.1. Disparitas atau Ketidakseimbangan

Disparitas berasal dari kata “*par*”, yang mempunyai konotasi tidak tepat (pada nilai atau keadaan yang dikehendaki). Dalam konteks pengembangan wilayah kata tersebut dipakai untuk suatu keadaan yang tidak seimbang, atau terjadinya kesenjangan (*gap*) diantara bagian-bagian pada suatu wilayah.

Perkembangan suatu wilayah bersifat dinamis dengan percepatan yang cenderung selalu meningkat. Suatu wilayah yang mempertahankan keadaan yang statis – berada pada keadaan stagnan – kemungkinan besar akan tertinggal oleh wilayah-wilayah lainnya.

Setiap wilayah mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi-kondisi ini tidak sama di antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga percepatan pengembangan/pembangunan masing-masing wilayah tersebut tidak sama, atau dapat dikatakan pertumbuhan tidak berlangsung secara merata. Jika dilihat secara keseluruhan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Adanya *gap* atau kesenjangan tersebut harus segera diatasi agar “jurang pemisah” tidak semakin lebar dan dalam, dan semakin sulit untuk diatasi/dikendalikan. Hendaknya perkembangan/pertumbuhan dapat berjalan seimbang, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara merata. Oleh karena itu harus dilakukan langkah-langkah untuk memperkecil *gap* tersebut atau bahkan meniadakannya (APW, 2003).

2.1.2. Pertumbuhan dan Akumulasinya

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, terutama di kota-kota besar. Daya tarik kota-kota besar ini tidak hanya menyedot tenaga kerja saja, melainkan juga modal dan sumber daya alam. Proses ini semakin lama semakin terakumulasi sehingga pertumbuhan secara keseluruhan sulit dikendalikan lagi.

Proses akumulasi pertumbuhan tersebut sering pula disebut polarisasi atau pengkutuban, yang menimbulkan kengerian akan tumbuhnya gigantisme kota-

kota metropolitan, yaitu kota raksasa yang tumbuh terus tanpa batas dan tidak dapat dikendalikan lagi. Dampak negatif yang dikhawatirkan adalah semua potensi dan sumber akan tersedot ke pusat sedangkan daerah sekitarnya tidak mampu tumbuh dan berkembang, atau akan menjadi daerah mati.

2.1.3. Teori Kutub Pertumbuhan (Francois Perroux)

Teori kutub pertumbuhan terutama berasal dari penelitian ahli Perancis, yang dipelopori Francois Perroux (1955) yang mempopulerkannya dengan nama “*pole de croissance*” atau “*growth pole*”.

Francois Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan (*development*) tidak terjadi di segala tempat pada ruang (*space*), tetapi hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda. Ruang tersebut diidentifikasi sebagai arena (medan) kekuatan, yang di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekuatan tarikan ke dalam.

Konsep mengenai kutub pertumbuhan yang abstrak ini lebih bertitik berat pada pertumbuhan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan dan industri-industri serta adanya saling ketergantungan di antaranya. Jadi lebih bersifat non-spasial, yaitu tidak menjelaskan pola geografis pergerakan ekonomi serta pergeseran industri secara intra (di dalam wilayah) dan inter (antar wilayah).

2.1.4. Teori Inti dan Pinggiran (Friedmann)

John Friedmann (1964) mengamati bahwa dalam suatu wilayah terdapat perbedaan yang prinsip di antara daerah inti (*center*) dengan daerah pinggiran (*periphery*) di sekitarnya, yang sering pula disebut daerah belakang, *hinterland* atau pedalaman.

Hubungan antara daerah inti dengan daerah pinggiran mempunyai karakter yang spesifik karena adanya pengaruh-pengaruh kuat dari daerah pusat terhadap daerah pinggirannya, antara lain pengaruh dominasi, pengaruh informasi dan pengaruh psikologis, pengaruh mata rantai dan pengaruh produksi.

- *Pengaruh dominasi*, muncul karena melemahnya perekonomian daerah-daerah pinggiran, sebagai akibat dari mengalirnya potensi (sumber daya

alam, manusia, dan modal) ke daerah inti. Bagaimanapun hal ini memperkuat dominasi daerah pusat terhadap daerah pinggirannya.

- *Pengaruh informasi*, terjadi akibat semakin meningkatnya interaksi potensi di daerah inti (yang menunjang peningkatan inovatif), sehingga daerah inti menjadi pusat informasi bagi daerah pinggirannya.
- *Pengaruh psikologis*, terasa akibat terciptanya kondisi-kondisi yang semakin menggairahkan di daerah inti yang dilanjutkan secara lebih nyata di pusat maupun di daerah pinggiran.
- *Pengaruh mata rantai*, ditandai dengan adanya kecenderungan melakukan inovasi-inovasi selanjutnya, dari hasil inovasi-inovasi yang terdahulu/sudah ada.
- *Pengaruh produksi*, yaitu peningkatan yang diakibatkan oleh penciptaan struktur balas jasa (imbalan) yang menarik untuk keberhasilan suatu inovasi atau tercapainya suatu prestasi.

Pada umumnya daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsinya yang bersifat khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan, pusat industri, ibukota pemerintahan, dsb. Berkenaan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan spasial, Friedmann mengemukakan lima hal utama sebagai berikut:

- a. Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya melalui sistem suplai, sistem pasar, dan sistem administrasi pemerintahan.
- b. Daerah ini secara sistematis meneruskan dorongan-dorongan inovasi ke daerah-daerah di sekitarnya, yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.
- c. Sampai pada suatu keadaan tertentu (ciri *self-reinforcing*), pertumbuhan daerah inti cenderung membawa pengaruh positif dalam proses pembangunan spasial. Tetapi mungkin pula akan membawa pengaruh negatif, jika tidak terjadi peningkatan penyebaran pembangunan dari daerah inti ke daerah-daerah pinggirannya, sehingga keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah pinggiran terhadap daerah inti berkurang.

- d. Dalam suatu sistem spasial, hierarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasarkan kedudukan fungsional masing-masing, meliputi karakteristik-karakteristiknya secara terinci dan prestasinya.
- e. Inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial, antara lain dengan cara mengembangkan sistem informasi.

2.2. Pembangunan Pedesaan

Banyak definisi mengenai arti pembangunan, salah satunya adalah proses perubahan secara dimensional yang memuat perubahan-perubahan sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi sosial Todaro. Disisi lain pembangunan dapat juga perubahan dari suatu kondisi nasional tertentu menuju kondisi nasional lain yang lebih menyejahterakan (Saul M. Kant), dan dengan definisi tersebut dapat kita mengartikan pembangunan sebagai proses transformasi yang lebih mengarah pada tujuan yang lebih baik dan kemajuan atau perubahan sosial.

Dalam teori pembangunan (*grand theory of development*) senantiasa memiliki muatan, dalam hal ini kita akan menggunakan definisi dari Todaro (1999)[1], bahwa pilar pembangunan memiliki tiga inti : kecukupan, jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Jika diterjemahkan lebih jauh, kecukupan memiliki maksud bahwa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Jati diri jika dikaji lebih jauh memiliki makna bahwa penemuan terhadap konsepsi diri dan bagaimana menggunakannya sebagai doktrin dalam menjalani kehidupan (*self orientation*). Yang terakhir adalah kebebasan atau kemampuan memilih, dan hal ini jika dijadikan sebagai pandangan maka turunannya adalah pada terjewantahkannya hak-hak individu pada persoalan atau kondisi kebebasan politik, keamanan, kepastian akan hukum, kemerdekaan beraspirasi atau berekspresi, tersalurkannya aspirasi secara politik, dan terdapatnya persamaan akan kesempatan-kesempatan yang ada (Asriyanto, 2009).

Kebijakan pembangunan pedesaan pada masa lalu diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan kemampuan produksi masyarakat, mengembangkan prasarana dan sarana di pedesaan, melembagakan pendekatan pengembangan wilayah terpadu serta memperkuat

lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kebijakan pembangunan pedesaan pada masa lalu antara lain diselenggarakan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Berbagai kebijakan tersebut belum cukup untuk memecahkan masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar sektor, dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai aturan untuk mengejar target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru semakin mempersulit penduduk miskin di pedesaan untuk mengakses sumber daya. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan masih kurangnya prasarana dan sarana dasar.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan pedesaan antara lain melalui pengembangan agro industri pedesaan untuk menciptakan kesempatan kerja diluar pertanian, peningkatan nilai tambah produk melalui penanganan pasca panen, penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi biaya transaksi, peningkatan akses meliputi pengembangan kredit mikro bagi petani, dan akses sumber daya produktif, peningkatan kelembagaan pemasaran output, perluasan kesempatan terutama meliputi perbaikan system penyuluhan, pembangunan system informasi petani, peningkatan SDM, dan penciptaan kerja alternative usaha (nafkah ganda), dan pengembangan prasarana dan sarana dasar seperti listrik, air bersih dan komunikasi (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2005-2009).

2.3. Percepatan Pembangunan Pedesaan

Penanggulangan kemiskinan di perdesaan, di samping telah dilakukan melalui pendekatan sektoral juga dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai program berbasis masyarakat tersebut telah dimulai dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang kemudian diikuti dengan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) atau Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D), Program Pengembangan

Kecamatan (PPK), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Pengembangan program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah perdesaan, pengembangan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta pengembangan program prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, berbagai program berbasis masyarakat tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan, dan tidak terbangun koordinasi secara baik antar pelaksana program. Di samping itu pelembagaan program pada tingkat masyarakat belum berjalan optimal sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas.

Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih, memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat, dan mengembangkan industri perdesaan untuk memperluas kesempatan kerja (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009).

2.4. Pembangunan Desa Tertinggal

Kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang relatif kurang berkembang dibanding wilayah lain berdasarkan kondisi dan fungsi antara dan dalam wilayah, baik pada kondisi alam, manusia maupun prasarana pendukungnya. Kebijakan pengembangan kawasan tertinggal selama ini diarahkan pada pengembangan wilayah yang sangat tertinggal, baik di pedalaman maupun di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terasing. Berbagai kebijakan yang dilakukan melalui pengembangan kecamatan, pelaksanaan program transmigrasi, dan pembinaan masyarakat suku terasing.

Berbagai kebijakan dan program percepatan pembangunan kawasan tertinggal dirasakan kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh rendahnya dukungan investasi, lemahnya koordinasi dan kurangnya keterpaduan. Selain itu, investasi

yang dikembangkan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal karena perencanaan yang kurang mempertimbangkan kemampuan tenaga kerja dan produk lokal.

Ketertinggalan daerah mencerminkan terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan sebagai dampak dari kebijakan pembangunan masa lalu yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi. Daerah tertinggal pada umumnya tersebar di daerah yang terletak di pedalaman, tepi hutan dan pegunungan, daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana alam dan daerah pesisir yang terpencil. Tidak tersentuhnya pembangunan di daerah tersebut menyebabkan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat dan lambatnya pertumbuhan kegiatan perekonomian di daerah tertinggal.

Kebijakan pengembangan daerah tertinggal selama ini diarahkan pada pengembangan daerah yang sangat tertinggal, baik di pedalaman maupun di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terpencil. Berbagai kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dirasakan kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pemihakan kepada daerah tertinggal, penanganan yang kurang terpadu, kelangkaan investasi, dan belum efektifnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Masalah-masalah yang dihadapi daerah tertinggal terutama adalah kurangnya sarana dan prasarana sosial berupa perumahan, pendidikan dan kesehatan dasar, keterisolasian wilayah dan kurangnya sarana prasarana ekonomi yang kurang mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah-daerah tertinggal, seperti ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan darat dan udara penghubung antar wilayah, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Rendahnya kualitas SDM serta lemahnya kapasitas masyarakat serta kelembagaan sosial ekonomi dalam pengelolaan usaha ekonomi, termasuk rendahnya akses petani, nelayan, transmigran, dan pengusaha kecil kepada informasi dan modal, juga merupakan masalah bagi lambatnya derap perkembangan ekonomi di daerah tertinggal.

Berdasarkan diagnosa kemiskinan daerah tertinggal dan analisa kebijakan yang dibuat selama ini, maka langkah strategis yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana ekonomi serta membuka keterisolasian wilayah melalui berbagai skim pengalokasian sumber pembiayaan seperti DAK (Dana Alokasi Desa) dan lainnya; peningkatan kualitas SDM terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta upaya-upaya peningkatan pelatihan ketrampilan ; serta penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, baik kelembagaan pemerintahan, kelembagaan ekonomi, maupun kelembagaan adat masyarakat terpencil. Upaya membuka keterisolasian fisik dan ekonomi daerah tertinggal juga didekati melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber pembiayaan daerah tertinggal dalam penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi, melalui sistem jaringan transportasi dan pengelompokan permukiman secara regional (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2005-2009).

2.5. Karakteristik Desa Terisolir (Terpencil)

Definisi desa terpencil menurut “Panduan Teknis Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil” yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya pada tahun 2007 adalah kawasan pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Kriteria desa terpencil antara lain adalah :

1. Sarana/infrastruktur aksesibilitas kurang/tidak ada (jalan/jembatan)
2. Secara geografis jauh dari pusat pertumbuhan
3. Ada isolasi geografis yang memisahkan dari daerah lain

Berdasarkan penelitian Yayasan Mitra Membangun pada tahun 2006-2007 dengan kajian yang berjudul “Identifikasi dan Pemetaan Daerah Terpencil di Kabupaten Sidoarjo”, didapatkan variabel-variabel sebagai dasar indikator daerah terpencil dan ditemukan bahwa umumnya daerah terpencil dicirikan dengan:

1. Aspek Geografis/Tipologi Wilayah. Posisi wilayah yang cukup terisolir secara geografis, dimana sebagai akibat keterpencilan wilayah serta medan

yang sulit dan sarana yang kurang mendukung (terutama sarana fisik misalkan akses jalan atau sarana fasilitas umum lainnya),

2. Aspek Geo-Politik. Keterjangkauan dan akses terhadap birokrasi dan administrasi ke pusat Kabupaten yang cukup sulit dijangkau masyarakat dan berdampak terhadap keterbatasan informasi.
3. Aspek Ekonomi. Kurangnya aksesibilitas dan keterjangkauan dari pusat pertumbuhan (*growth center*) atau dari pasar.
4. Aspek Sosio-Budaya. Karakteristik/tipologi (sosio-kultur dan *sosial behavior*) masyarakat yang kebanyakan masih berkuat pada sektor primer (*on farm*).

Bisa saja dalam identifikasi kawasan terpencil muncul keempat aspek tersebut maupun ada aspek tambahan atau setidaknya ada satu aspek yang mencirikan keterpencilan wilayah tersebut. Dalam upaya pengembangan kawasan terpencil pada suatu wilayah justru harus dimunculkan adanya indikator yang lebih bersifat *local genuine* sehingga akan dapat mendeskripsikan secara jelas terhadap kondisi ke-lokalan-nya. Perlu adanya serangkaian proses dan kegiatan yang dirangkai untuk melakukan observasi dan diskusi dengan *multi-stakeholder* untuk memastikan indikator-indikator lokal atas kawasan terpencil.

2.6. Karakteristik Desa Tertinggal

Definisi desa tertinggal menurut “Panduan Teknis Identifikasi Lokasi Desa Tertinggal, Desa Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil” yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya pada tahun 2007 adalah kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Membangun pada tahun 2006-2007, secara definitif, ketertinggalan suatu wilayah juga disebabkan karena keterpencilan wilayah tersebut.

Kriteria desa tertinggal antara lain sebagai berikut:

1. Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada. Adapun prasarana dasar wilayah yang dimaksud adalah,

- Air bersih
 - Listrik
 - Irigasi
2. Sarana wilayah kurang/tidak ada. Sarana wilayah meliputi,
 - Sarana ekonomi (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 - Sarana Sosial (Kesehatan dan Pendidikan)
 - Sarana transportasi (Moda Angkutan Umum)
 3. Perekonomian masyarakat rendah, yang ditandai dengan besarnya prosentase jumlah masyarakat miskin/pra sejahtera.
 4. Tingkat pendidikan rendah, yang ditandai dengan keterbelakangan atau rata-rata pendidikan penduduk kurang dari sembilan tahun (di bawah jenjang Sekolah Menengah Pertama).
 5. Tingkat produktivitas rendah, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang tidak bekerja/menganggur.

2.7. Karakteristik Desa Miskin

Karakteristik kemiskinan desa menurut Badan Pusat Statistik terdiri atas 14 indikator, dimana rumah tangga yang tergolong miskin adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin tersebut. Adapun ciri rumah tangga miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m²/anggota keluarga)
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah/bambu/kayu)
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester)
4. Fasilitas tempat MCK (tidak memiliki/bersama rumah tangga lain)
5. Sumber penerangan rumah tangga (bukan listrik)
6. Sumber air minum (sumur/mata air tak terlindungi/sungai/air hujan)
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah)
8. Konsumsi daging/susu/ayam per minggu (tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam satu minggu)
9. Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun (tidak pernah/hanya satu stel per tahun)

10. Makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga (hanya satu kali/2 kali makan)
11. Kemampuan berobat ke klinik/puskesmas (tak mampu membayar)
12. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga (petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan/atau pekerjaan lain dengan penghasilan di bawah 600.000 rupiah per bulan)
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga (tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/hanya Sekolah Dasar)
14. Pemilikan aset (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya).

2.8. Konsep-Konsep Kemiskinan

Berbicara tentang pembangunan tidak bisa dilepaskan dengan konsep kemiskinan, karena ibaratnya antara kemiskinan dan pembangunan seperti dua sisi dari satu mata uang. Artinya konsep pembangunan sebagai jawaban dari munculnya kemiskinan, dan atau sebaliknya proses pembangunan tidak jarang pula menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan adalah konstruksi sosial yang sulit untuk dihapuskan. Miskin adalah suatu kondisi tingkat kekurangan materi pada segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, prasyarat pertama dari konsep kemiskinan adalah penentuan suatu kriteria tentang kelompok sosial mana yang harus menjadi perhatian (Syaiful Bahri, 2005).

Adapun beberapa konsep kemiskinan antara lain adalah :

- a. Kemiskinan merupakan kondisi ketidak-adilan dalam pemilikan faktor produksi.
- b. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar/hinaan, serta tak diperdulikan ketika sedang mencari pertolongan.
- c. Kemiskinan adalah ketidak-berdayaan sekelompok masyarakat terhadap system yang diterapkan oleh suatu pemerintah, sehingga mereka berada pada posisi lemah dan tereksplorasi.

- d. Kemiskinan adalah suatu keadaan kerentanan, ketidakberdayaan dan ketidak mampuan menyampaikan aspirasi.
- e. Kemiskinan merupakan suatu penyebab sekaligus dampak. Yang dimaksudkan disini adalah kemiskinan sendiri seperti suatu lingkaran setan dimana kemiskinan sendiri menyebabkan berbagai bentuk kemiskinan. Semisal karena miskin, masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi yang kemudian berpengaruh pada kinerja dan kualitas SDMnya, kualitas SDM rendah menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan, dan begitu seterusnya.

Selain dari konsep-konsep tersebut, konsep-konsep yang banyak dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah :

- a. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya (*Oscar Lewis*).

Dalam konteks tersebut, kemiskinan adalah ketidakcukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki atau dikuasainya betul-betul sangat terbatas, sekadar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya, tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Budaya kemiskinan dan institusi sosial yang muncul dari kemiskinan cenderung akan memperkuat dan memapankan kemiskinan itu sendiri, bukannya menemukan jalan dan atau ruang bagi para pendukungnya untuk bisa naik status sosial-ekonominya.

- b. Orang-orang miskin adalah, "ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya" (*James Scott*).

Kemiskinan terkait langsung dengan pengalaman seseorang, di perdesaan maupun di perkotaan atau di mana pun, yang mengalami kelangkaan, keterbatasan, dan kekurangan dalam pemilihan dan penguasaan atas benda atau tidak adanya akses dan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi

atau kapital lainnya, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk bisa melakukan mobilitas secara vertikal.

- c. Apa pun yang dimiliki dan dikuasai orang-orang miskin, apakah itu harta benda, sumber daya ekonomi, institusi sosial, dan cara-cara hidup tertentu selalu berputar dalam mekanisme yang involutif (*Clifford Geertz*).

Apa pun yang ada pada masyarakat miskin itu, bahkan bentuk-bentuk pola kerja sama dan solidaritas yang tumbuh di antara mereka, selalu berputar-putar di dalam dan menjebak mereka sendiri untuk tetap hidup dalam batas-batas subsistensi ekonomi, bukan suatu pergerakan yang evolutif, yang berkembang.

- d. Kemiskinan sebagai suatu proses atau keadaan deprivasi kapabilitas (*Amartya Sen*).

Insidensi kemiskinan bukanlah semata-mata terjadi karena rendahnya pendapatan (*lowness of incomes*), tetapi juga karena ketidakkampuan untuk mengejar kesejahteraan itu karena berbagai sebab. Perspektif deprivasi kapabilitas ini tidak berarti menghapus sama sekali pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan rendahnya pendapatan namun Sen jauh lebih menekankan bahwa rendahnya pendapatan adalah salah satu dari sebab utama kemiskinan, karena rendahnya pendapatan dapat menjadi alasan bagi terjadinya deprivasi kapabilitas seseorang. Jadi, pada intinya dapat kita katakan bahwa kemiskinan tidak sama dengan rendahnya pendapatan, tetapi rendahnya pendapatan adalah salah satu gambaran dari keadaan kemiskinan.

- e. Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” atau “income-poverty” (*Chambers, 1997*).

Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- f. Kemiskinan umumnya ditandai oleh isolasi – berlokasi jauh dari pusat-pusat perdagangan, diskusi dan informasi, kurangnya nasehat dari

penyuluh pertanian, kehutanan dan kesehatan serta pada banyak kasus juga ditandai dengan ketiadaan sarana bepergian. Kelompok masyarakat miskin amat rentan karena mereka tidak memiliki sistem penyangga kehidupan yang memadai. (Chamber, 1983)

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri.

Kemiskinan juga ditandai oleh adanya masalah ketimpangan antarwilayah. Kemiskinan di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda. Lebih dari 70% penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan ini. Namun, persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali khususnya di kawasan timur Indonesia jauh lebih tinggi.

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada

tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja dan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Kuncoro, (1997: 102–103) mengemukakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

Friedmann merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya).
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka
4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia.
5. Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah *impoverishment* (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses *impoverishment* adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumber daya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri.

2.8.1. Permasalahan Kemiskinan

Dalam penelitian Syaiful Bahri pada tahun 2005, dikatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan) yang terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23). Adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.
2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut

Kartasasmita (1996: 236) hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat. 1999: 150) sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: Kemiskinan, Kelemahan jasmani, Isolasi, Kerentanan, Ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi (Chambers, 1983 : 145-147).

2.8.2. Karakteristik Kemiskinan Desa Pesisir

Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. Penduduk di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidupan dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan laut. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, usaha nelayan bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan utang pedagang atau pemilik kapal. Di samping itu, tekanan ekonomi seringkali mendorong eksploitasi pekerja anak seperti anak yang dipekerjakan di jermal.

Masyarakat miskin di kawasan tertinggal pada umumnya tidak mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal karena keterisolasian fisik yang menyebabkan terbatasnya pasar dan kegiatan ekonomi. Keterisolasian dalam

waktu yang lama cenderung menyebabkan apatisme masyarakat miskin. Kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat. Kurangnya peluang yang tersedia di kawasan ini dan rendahnya pendidikan dapat mendorong migrasi gelap dan perdagangan manusia. Laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumahtangga dan masyarakat sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan politik.

2.8.3. Karakteristik Sosial Budaya Desa Pesisir

Berbagai aspek masyarakat nelayan telah menyesuaikan diri dengan lingkungan lautan dan mata pencahariannya yang masih sangat bergantung pada alam. Dua kategori utama perikanan harus dibedakan sejak awal yaitu penangkapan ikan dan budidaya ikan. Pada dasarnya terdapat banyak sekali perbedaan antara keduanya dan hanya ada satu kesamaan yaitu hasilnya, ikan. Dalam pola kerjanya budidaya ikan lebih menyerupai pertanian atau peternakan. Pada umumnya seseorang yang membudidayakan ikan memperbaiki daerah tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ikan dan memperoleh hak atas ikan. Pemilikan ikan menyerupai apa yang ada dalam pertanian. Di lain pihak penangkapan ikan bergantung pada kemudahan bersama (*open acces*) yang berarti para nelayan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya. Karena tangkapan tergolong liar, ada elemen resiko yang dihadapi dan lokasi penangkapan ikan juga harus berpindah-pindah. Sebaliknya jika dalam budidaya ikan, proses penangkapan atau yang lebih sesuai disebut dengan memanen, cenderung lebih terkontrol. Dalam banyak hal para pengusaha budidaya lebih tahu dimana lokasi ikan dan kapan ikan dapat ditangkap serta hasil dari memanen kurang lebih dapat diperkirakan. Jika dilihat dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam kebutuhan tenaga manusia dan modal. Nelayan hanya perlu menangkap apa yang berkembang biak secara alamiah dan pada perikanan dengan jenis tangkapan ini dapat dilakukan dengan investasi modal yang relatif rendah. Sebaliknya dalam sistem budidaya,

memerlukan pemeliharaan dan penangkapan yang bergantung pada pengaturan tenaga kerja yang kompleks yang membutuhkan pelatihan.

Kategori perikanan tangkapan juga terdiri pada skala besar dan skala kecil. Perikanan berskala besar cenderung lebih padat modal; memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari perikanan sederhana; menghasilkan ikan dengan pangsa pasar yang jauh lebih luas. Sedangkan perikanan berskala kecil pada umumnya terletak di daerah pedesaan dan pesisir, dekat dengan laut dan muara; memiliki sebuah ciri khusus karena pada umumnya bertumpang tindih dengan kegiatan lain seperti pertanian, peternakan dan budidaya ikan; sangat padat karya dan sesedikit mungkin menggunakan tenaga mesin; pada umumnya menggunakan teknologi primitif dalam penanganan dan pengolahan hasil tangkapan ikan dengan akibat bahwa dapat terjadi kerugian panen yang sangat berarti; hasil panen tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan besarnya sumber daya ikan di laut; jenis hasil panen pada umumnya hanya bisa dikonsumsi untuk dalam negeri dan hanya menghasilkan ikan yang diawetkan dan dikonsumsi langsung oleh manusia.

Dalam banyak hal, nelayan membentuk masyarakatnya sendiri. Nelayan juga seringkali terasing karena mereka harus hidup di sepanjang tepi sungai atau laut. Keterasingan relatif ini semakin besar jika lokasi pesisir sangat jauh dari konsentrasi penduduk pada umumnya. Selain itu, jam kerja masyarakat nelayan yang pada umumnya pada malam hari atau pagi buta menyebabkan perbedaan yang terdapat dalam karakteristik masyarakat nelayan semakin mencolok.

Tempat tinggal dan keterasingan sosial ini sangat mempengaruhi variabel sosial budaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan. Hal tersebut juga mendukung rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan. Pada masyarakat nelayan terdapat pembagian kerja menurut jenis kelamin. Pada umumnya wanita hanya dibatasi untuk melakukan kegiatan di tepi pantai saja (termasuk penangkapan ikan dan kerang di laut dangkal). Suatu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin sering terbukti dalam sistem distribusi dan pemasaran. Ikan merupakan produk yang sangat mudah rusak dan tidak mudah disimpan tanpa teknik-teknik canggih untuk pengeringan atau pembekuan dan pengeluaran yang besar untuk tenaga kerja. Peranan wanita sebagai pedagang ikan menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan, karena pria mungkin hanya

kadang-kadang saja menangkap ikan sedangkan wanita bekerja sepanjang tahun (Richard Polnac, 1977)

Menurut *Richard Polnac*, terdapat beberapa aspek khusus yang harus diperhatikan dalam budaya dan masyarakat nelayan dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain adalah :

Pertama, perubahan sumber daya secara musiman dan ketidaksuburan daerah pesisir sering mengakibatkan nelayan untuk memutuskan berpindah tempat tinggal sehingga menyebabkan perubahan jam kerja serta perubahan pendapatan.

Kedua, tempat tinggal di sepanjang tepi aliran sungai atau laut serta karakteristik yang tidak biasa dari masyarakat pesisir menyebabkan masyarakat nelayan menjadi terasing secara sosial. Keterasingan tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan dalam mencapai pendidikan formal serta berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam komunitas tersebut.

Ketiga, resiko fisik yang terdapat dalam proses penangkapan ikan serta perlunya koordinasi antar awak perahu menuntut kepercayaan serta kemandirian dari setiap awak kapal sehingga resiko terjadinya perselisihan antar awak ketika melaut dapat ditekan. Koordinasi tersebut dapat mempengaruhi proses penangkapan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil produksinya.

Keempat, penanganan secara khusus, pengolahan dan pemasaran ikan membutuhkan tenaga-tenaga yang sangat terlatih.

2.9. Pemberdayaan Keluarga Miskin

Kata “*empower*” atau “berdaya” dalam kamus bahasa ditafsirkan sebagai “berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan berkenaan dengan perlindungan hukum”, “memberikan seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu”, “menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu” atau “membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak”. Pada kamus yang lain pengertian menjadi “memberikan seseorang rasa percaya diri atau kebanggaan diri”. Definisi pemberdayaan sendiri masih dalam perdebatan teoritik.

Penggunaan kata “*empowerment*” dan “*to empower*” diterjemahkan menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Konsep *empowerment*

(pemberdayaan) yang dirintis oleh Friedmann (1992: 124) memunculkan adanya 2 (dua) premis mayor, yaitu “kegagalan dan harapan” dalam memandang konsep-konsep keneyesian. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi terdahulu dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya model-model pembangunan alternatif yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan menurut Friedman bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral yang berkembang dalam lokalitas. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan hanyalah gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu (Syaiiful Bahri, S.Sos; 2007)

Elemen-elemen pemberdayaan termasuk :

1. Swadaya dan otonomi lokal dalam proses pengambilan keputusan masyarakat di tingkat desa, dan partisipasi demokrasi langsung dalam proses pemerintahan representatif yang lebih luas.
Ini akan memungkinkan masyarakat menggunakan kapasitasnya untuk memanfaatkan jasa informasi, berlatih memikirkan masa depan, melakukan eksperimen dan inovasi, berkolaborasi dengan orang lain, dan mengeksplorasi kondisi-kondisi serta sumberdaya-sumberdaya baru;
2. Penyediaan ruang bagi masyarakat untuk menegaskan kebudayaan serta kesejahteraan spiritualnya, dan pembelajaran sosial yang bertumpu pada pengalaman, termasuk pengungkapan dan penerapan kearifan lokal, di samping pengetahuan teoritis dan ilmiah;
3. Akses terhadap tanah dan sumberdaya lainnya, pendidikan untuk perubahan, dan fasilitas perumahan serta kesehatan;
4. Akses terhadap pengetahuan dan ketrampilan (dari dalam maupun dari luar) untuk mempertahankan kekayaan alam secara konstan dan kapasitas alam menerima buangan;

5. Akses terhadap latihan ketrampilan, tehnik-tehnik pemecahan masalah, dan teknologi serta informasi tepat guna yang ada, sehingga pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki bisa dimanfaatkan; dan
6. Partisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan oleh semua orang, terutama perempuan dan kelompok-kelompok yangpinggiran.

Elemen-elemen pemberdayaan di atas merupakan apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan terjadinya perubahan. Pemikiran pembangunan alternatif menekankan pada transformasi politik, ekonomi, lingkungan hidup, kelembagaan sosial serta nilai-nilai komunitas melalui pemberdayaan. Pembangunan yang bertumpu pada komunitas hendaknya berakar pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kedaulatan, kebebasan, dan demokrasi melalui partisipasi politik yang luas
2. Komunitas lokal mengontrol sendiri sumberdayanya dan memiliki akses memadai pada informasi
3. Membangun suatu sistem nilai yang konsisten sesuai dengan perikehidupan komunitas dan hubungan mereka dengan alam dan sumberdayanya.
4. Membangun semangat gotong royong di antara anggota komunitas untuk membangun masa depan bersama.

Pemberdayaan pada akhirnya memberikan kepada komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan kapasitas yang sesungguhnya agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan baik sebagai masyarakat maupun komunitas. Transisi ini membutuhkan kesadaran sosial, partisipasi sosial yang lebih tinggi, pemanfaatan pemahaman baru atas proses ekologi perubahan dan pembaruan diri.

Tekanan terbesar dalam proses pembedayaan dalam pembangunan berkelanjutan dan pengetasan kemiskinan adalah pemberdayaan sosio-ekonomi, pemberdayaan politik, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan teknologi dan pemberdayan kebudayaan atau spiritual.

- *Pemberdayaan sosio-ekonomi* ini akan mendorong individu dan komunitas memperoleh tanggung jawab bersama menentukan masa depannya dan menjadi manajer perubahan yang diinginkan.

- *Pemberdayaan politik dan pendidikan* melalui pendidikan kemandirian atau pendidikan pembebasan akan meningkatkan kapasitas komunitas bergelut dengan isu-isu demokrasi dan keadilan serta merasa memiliki kemampuan berbicara tentang apa yang dipikirkan dan pandangannya terhadap dunia serta menentukan sendiri kehidupan yang dibayangkan.
- *Pemberdayaan teknologi* melalui pengakuan atas pengetahuan lokal dan ketrampilan melalui kerjasama internasional adalah penting untuk memecahkan dilema pertumbuhan, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini akan melibatkan perkembangan dan bertukar teknologi yang akan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan, kesejateraan dan mengurangi dampak buruk kerusakan lingkungan hidup.
- *Pemberdayaan kebudayaan dan spiritual* bertujuan memahami kebudayaan dan spiritualitas sebagai basis eksistensi manusia dan sebagai landasan keberlanjutan peradaban umat manusia. Dalam perdebatan para pakar pembangunan, kebudayaan dan spiritualitas menjadi kunci dalam implelementasi pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulannya pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana masyarakat memiliki kapasitas untuk memanfaatkan akses dan pilihan-pilihan seperti ruang kebudayaan dan spiritual, pengakuan dan validasi pada pengetahuan lokal, pendapatan, kredit, informasi, training, dan partisipasi pada proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan merupakan the *missing ingredient* (unsur tersembunyi) dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber hidup penting. Upaya masyarakat miskin melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui power yang dimilikinya merupakan bagian dari pembangunan manusia (*personal/human development*). Pembangunan manusia merupakan proses kemandirian (*self-reliance*), kesediaan bekerjasama dan toleran terhadap sesamanya dengan menyadari potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terwujud

dengan menimba ilmu dan ketrampilan baru, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam komunitas mereka.

Bagaimana pemberdayaan masyarakat merupakan satu masalah sendiri yang berkaitan dengan hakekat dari kekuasaan, serta hubungan antar individu atau lapisan-lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan kekuasaan. Hanya saja kadar dari kekuasaan itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan, dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait itu pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan proses rekonstruksi hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mensyaratkan adanya pengakuan subyek atas kemampuan atau power yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya *flow of power* (transfer kekuasaan) dari subyek ke obyek. Pemberian kekuasaan, kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber daya tersebut. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya dengan pemberian pengakuan oleh subyek merupakan bukti bahwa individu tersebut memiliki kekuasaan/daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya ini dapat terwujud suatu upaya aktualisasi diri dari obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subyek. Dalam pengertian yang lebih luas, hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan ditandai dengan relasi antar subyek (lama) dengan subyek (baru) yang lain. atau proses pemberdayaan adalah mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi relasi subyek-subyek.

Terdapat dua perspektif atas dimensi power itu, yaitu perspektif distributif yang menghambat pemberdayaan, dan perspektif generatif yang cenderung

mendukung pemberdayaan (Mas'ood, 1994: 100-101). Bila power ditinjau dalam perspektif distributif, maka ia bersifat zero-sum dan sangat kompetitif. Kalau yang satu mempunyai daya berarti yang lain tidak punya. Kalau satu pihak memperoleh tambahan daya, berarti pihak yang lain kehilangan. Dalam hubungan kekuasaan seperti ini, aktor yang berperilaku rasional dianggap tidak mungkin bekerjasama karena hanya akan merugikan diri sendiri. Kalau pemberdayaan si miskin dapat dilakukan dengan mengurangi kekuasaan si pemegang kekuasaan, maka pasti si penguasa akan berusaha mencegah proses pemberdayaan itu.

Sebaliknya, yang berlaku pada sisi perspektif generatif bersifat *positivesum*. Artinya, pemberian pada pihak lain dapat meningkatkan daya sendiri. Kalau daya suatu unit sosial secara keseluruhan meningkat, semua anggotanya dapat menikmati bersama-sama. Dalam kasus ini, pemberian daya kepada lapisan miskin secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya si pemberi, yaitu si penguasa. Dengan menggunakan kajian teori yang ditawarkan oleh Sarah Cook dan Steve ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga out put yang akan dihasilkan mampu berdaya guna secara optimal. Upaya pemberdayaan dapat juga dilakukan melalui 3 (tiga) jurusan (Kartasmita, 1995: 4) yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan

kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, melainkan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya.

Namun Friedmann juga mengingatkan bahwa sangatlah tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat madani diabaikan. Oleh karena itu, menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar menawar yang kompetitif, baik secara nasional maupun internasional. Paradigma pemberdayaan ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri, kelompok orang miskin ini, juga diberi kesempatan untuk mengelola pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak luar (Soetrisno, 1995: 80).

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan) (Chambers, 1983: 290).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Alternatif konsep pertumbuhan ini oleh Friedmann (1992: 68) disebut sebagai *alternative development* (pembangunan alternatif) yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*” (demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesetaraan gender dan persamaan antara generasi). Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible and antithetical*” (tidak cocok dan antitetis). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*Zero sum game*” dan “*trade-off*” (prinsip pilih salah satu). Ia bertitik tolak dari pandangan

bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan serta akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (dalam Kartasasmita, 1996: 90), “*the right kinds of growth*” (pertumbuhan yang benar), yakni bukan pertumbuhan vertikal yang menghasilkan “*trickle-down*” seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horisontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive, and compartmentalized* (berbasis luas, intensif tenaga kerja, dan saling melengkapi).

2.10. Teori *Information Asymmetric*

Dalam ilmu ekonomi dan teori kontrak, *information asymmetry* berhubungan dengan penelitian mengenai pengambilan keputusan dalam transaksi, dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan dengan pihak yang lain. Hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam suatu transaksi, yang kadang kala menyebabkan transaksi menjadi serba salah. Contoh dari permasalahan tersebut adalah pilihan yang merugikan (*adverse selection*) dan resiko moral (*moral hazard*).

Model *information asymmetry* berpendapat bahwa sedikitnya satu pihak dalam sebuah transaksi memiliki informasi yang relevant dimana pihak yang lain tidak memiliki informasi tersebut. Beberapa model *information asymmetry* juga dapat digunakan dalam kondisi dimana sedikitnya satu pihak dapat melaksanakan, atau membalaskan pelanggaran secara efektif, bagian tertentu dalam sebuah perjanjian, sedangkan pihak yang lain tidak dapat melaksanakannya.

Dalam model *adverse selection*, pihak yang lemah kekurangan informasi, ketika merundingkan sebuah pemahaman yang disetujui atau dikontrak dalam transaksi, sedangkan dalam *moral hazard* pihak yang lemah kekurangan informasi mengenai pelaksanaan dalam transaksi yang disetujui atau kurangnya kemampuan untuk membalas jika terjadi pelanggaran dalam persetujuan. Sebagai contoh dalam *adverse selection* adalah ketika orang yang memiliki resiko yang tinggi lebih suka untuk membeli asuransi, karena perusahaan asuransi tidak dapat mendiskriminasikan mereka, pada umumnya pihak asuransi kekurangan informasi

mengenai resiko individu yang dimiliki konsumen, tetapi terkadang juga dengan paksaan hukum atau batasan yang lain. Sebuah contoh dari *moral hazard* adalah ketika orang lebih suka berkelakuan sembrono setelah memiliki asuransi, karena para penjamin asuransi tidak dapat mengamati perilaku ini atau tidak dapat melawannya (secara hukum) dengan efektif, sebagai contoh dengan kegagalan untuk membuat asuransi baru.

Menurut George Akerlof dalam buku *The Market for Lemons*, terdapat dua solusi utama dalam mengatasi *adverse selection*.

a. *Signaling*

Michael Spence yang mula-mula mengemukakan ide pemberian isyarat (*signaling*). Dia mengemukakan bahwa dalam suatu kondisi dengan ketidaksamaan informasi, masyarakat mungkin akan memberitahukan golongan/tipe mereka, kemudian dengan rasa percaya mengirimkan informasi kepada pihak yang lain dan memecahkan masalah ketidaksamaan informasi.

Ide tersebut pada awalnya dipelajari dalam konteks pencarian sebuah pekerjaan. Seorang pegawai tertarik untuk mempekerjakan seorang pegawai baru yang terlatih (cekatan) dalam belajar. Tentu saja seluruh calon pegawai akan menunjukkan bahwa mereka cekatan dalam pembelajaran, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa mereka cekatan atau tidak. Hal ini adalah sebuah ketidakseimbangan informasi.

Spence mengemukakan, misalnya, bahwa kuliah dapat dijadikan tanda yang dapat dipercaya dari sebuah kemampuan untuk belajar. Dengan asumsi bahwa orang-orang yang memiliki keahlian dalam belajar dapat menyelesaikan kuliah lebih mudah bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ketrampilan, jadi dengan menyelesaikan kuliah, orang-orang yang terlatih menandakan kemampuannya untuk menjadi pegawai yang prospektif. Tidak peduli seberapa banyak atau sesedikit apa yang telah dipelajari di universitas, lama waktu menyelesaikannya berfungsi sebagai tanda kapasitas mereka dalam belajar.

b. *Screening*

Joseph E. Stiglitz merintis teori penyaringan (*screening*). Dengan cara ini pihak yang kekurangan informasi dapat menyebabkan pihak yang lain

mengungkapkan informasi mereka. Mereka dapat menyediakan sebuah daftar pilihan dalam suatu cara dimana pilihan tersebut bergantung pada informasi pribadi dari pihak yang lain.

Contoh situasi dimana penjual selalu memiliki informasi yang lebih baik dari pembeli sangat banyak sekali, termasuk penjual mobil, makelar gadai dan pemilik piutang bunga, agen real estate dan transaksi asuransi jiwa.

Contoh situasi dimana pembeli selalu memiliki informasi yang lebih baik dari penjual adalah penjualan rumah yang termasuk dalam surat wasiat atau keinginan terakhir seseorang, penjualan barang seni kuno tanpa persetujuan penaksir harga profesional yang dapat mengetahui nilainya, atau asuransi kesehatan dengan berbagai macam tingkatan resiko. Situasi ini pertama kali disebutkan oleh Kenneth J. Arrow dalam artikel kepedulian kesehatan pada tahun 1963.

2.11. Strategi Dasar Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dilakukan strategi dasar melalui empat pilar (Strategi dan Kebijakan Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal, 2008):

- a. Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat;
- b. Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui : (1) penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah, (2) pemanfaatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pembangunan kawasan produksi;
- c. Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah;

- d. Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik '*keterisolasian*', dilakukan melalui: (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil

2.12. Skenario Penanganan Desa Tertinggal

Strategi penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dapat dilakukan dengan sistem stimulasi. Dengan stimulan penanganan keterpencilan dan ketertinggalan dilakukan dengan melakukan kajian guna memilih salah satu desa dalam kawasan terindikasi untuk kemudian dijadikan pusat pembangunan atau percontohan dengan harapan terjadi suatu efek penggandaan (*multiplier effect*) pada desa-desa disekitarnya (Panduan Teknis Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil).

Pembangunan ketertinggalan suatu wilayah merupakan program pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam suatu daerah. Untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, diindikasikan beberapa bentuk program penanganan antara lain:

1. Program Penyediaan Prasarana Dasar Wilayah
 - a. Pemerataan Ketersediaan Listrik
 - b. Pemerataan Ketersediaan Air
 - c. Pemerataan Ketersediaan Telepon
2. Program Penyediaan Sarana Wilayah
 - a. Penyediaan Sarana Ekonomi
 - Pasar
 - Pertokoan
 - Perkantoran
 - Pedagang Kaki Lima
 - b. Penyediaan Sarana Industri
 - Rumah Tangga
 - Industri Menengah

- Industri Besar
- c. Penyediaan Sarana Kesehatan
 - Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - Puskesmas Pembantu
- d. Penyediaan Sarana Pendidikan
 - Sekolah Dasar
 - Sekolah Menengah Pertama
 - Sekolah Menengah Atas
- e. Penyediaan Sarana Transportasi
 - Terminal
 - Stasiun
 - Moda angkutan umum

3. Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian dan industri yang menghasilkan komoditas unggulan daerah.

Pengelolaan potensi ekonomi masyarakat ditunjukkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, menaikkan kegiatan perdagangan lokal dan antar Daerah, terbentuknya jaringan pemasaran yang baik, serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja.

Sedangkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Kebijakan pada pembangunan pertanian yang kuat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya nutfah daerah secara optimal. Kegiatan prioritas pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal adalah sebagai berikut :

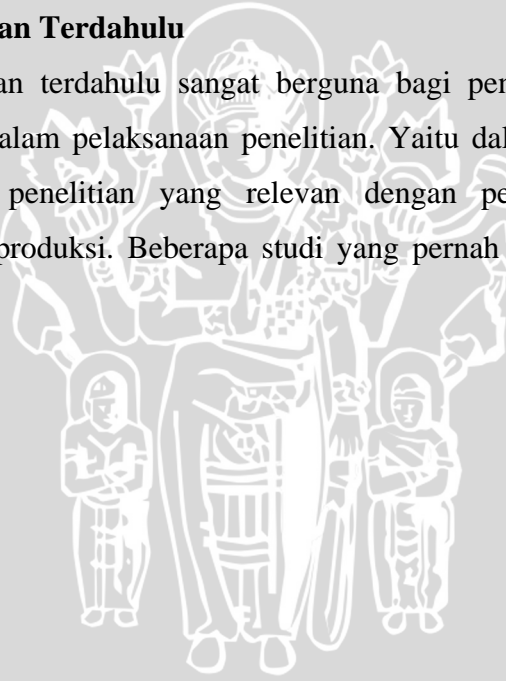
- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat
- b. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan pendekatan padat karya

- c. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi dengan alternatif USO (*universal Service Obligation*) untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa, dengan pendekatan proyek padat karya
 - d. Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat;
 - e. Mendorong Investasi swasta dan asing pada potensi karakteristik daerah
 - f. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi;
 - g. Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat
- Program pembangunan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan. Kegiatan prioritas pendidikan adalah :
- a. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yaitu:
 - Pendirian SD kecil dan fasilitas sarana dan filial di daerah-daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau
 - Perbaikan bangunan sekolah;
 - Pengadaan buku pelajaran dan alat peraga.
 - b. Peningkatan kualitas dan kualifikasi guru
 - c. Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun baik melalui pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah
 - d. Mempercepat pemberantasan buta aksara dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
5. Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan produktivitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui kegiatan melalui kegiatan prioritas

- a. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan prioritas:
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja;
 - Peningkatan penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja
 - Memfasilitasi pengiriman tenaga kerja antar daerah maupun antar negara
- b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan prioritas:
 - Pengembangan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan;
 - Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- c. Perlindungan tenaga kerja dengan prioritas berupa:
 - Peningkatan hubungan pengusaha dengan tenaga kerja;
 - Perlindungan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

2.13. Telaah Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian terdahulu sangat berguna bagi penulis, karena dapat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Yaitu dalam mencari kajian pustaka dan metode penelitian yang relevan dengan penelitian mengenai pengembangan sentra produksi. Beberapa studi yang pernah dilakukan, sebagai berikut :



Tabel 2. 1 Telaah Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode
1	Yayasan Mitra Membangun (2006)	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Terpencil Kabupaten Sidoarjo (studi kasus: kec.Buduran, kec. Jabon, kec.Sidoarjo)	Inventarisasi Potensi Lokal yang dimiliki desa-desa pesisir Kabupaten Sidoarjo	Perekonomian masyarakat, prasarana atau infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, tipologi daerah.	Metode deskriptif, evaluatif, preskriptif
2	Ir. Arifin Rudyanto, MSc., PhD (2004)	Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut	Identifikasi Karakteristik Wilayah Peisir Indonesia secara Umum dengan mengungkapkan isu-isu strategis kelautan	Lingkungan dan fisik wilayah pesisir, SDA yang terdapat di wilayah pesisir, SDM penduduk wilayah pesisir, akses, teknologi penangkapan ikan.	Metode deskriptif
3	Evi Rahmalia, SP (2003)	Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa-Desa Pesisir Kota Bandar Lampung	Identifikasi karakteristik desa-desa pesisir Kota Bandar Lampung	Jenis mata pencarian, tingkat pendapatan, aktivitas sosial, karakteristik budaya masyarakat, degradasi lingkungan	Metode deskriptif
4	Syaiful Bahri, S Sos (2007)	Kajian Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Program Gerdu Taskin di Kabupaten Jombang	Menguji pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Tingkat pendidikan, kondisi pasar, tingkat pendapatan,	Metode deskriptif evaluatif
5	Budiyono, (Universitas Negeri Malang), 1999	Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk Desa Fajar Baru Sebagai Desa Tertinggal di Wilayah Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan	Mengkaji bentuk kemiskinan di desa tertinggal	Karakteristik penduduk miskin, pendapatan dan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok, serta harapan penduduk kepada pemerintah	Metode deskriptif dengan mendasarkan pada tabulasi frekuensi dan persentase dalam melakukan analisis data
6	Sugeng Utaya, Universitas Negeri Malang	Kualitas Lingkungan Permukiman Penduduk Miskin Daerah Pedesaan di Kabupaten Tulungagung	Mengetahui kondisi kualitas permukiman penduduk miskin di daerah pedesaan di Kabupaten Tulungagung dan kaitan kualitas lingkungan permukiman tersebut dengan kondisi sosial ekonomi penduduknya	Kualitas lingkungan rumah dan lingkungan permukiman penduduk miskin, kondisi sosial ekonomi penduduknya, dan faktor yang menonjol adalah jumlah anggota keluarga dan tingkat pendapatan	Korelasi kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dianalisis dengan label silang dan regresi ganda

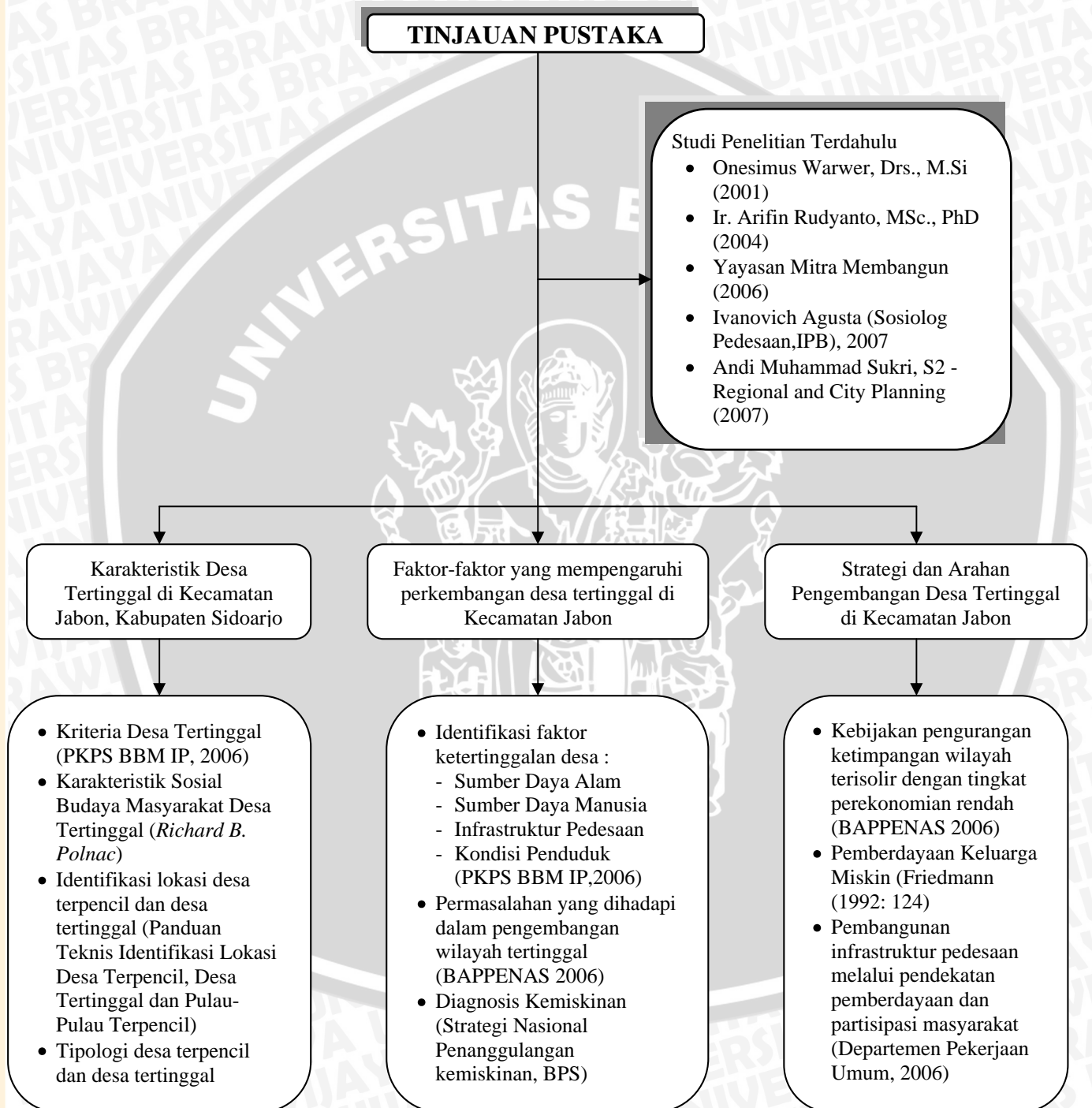
No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode
7	Ivanovich Agusta (Sosiolog Pedesaan,IPB), 2007	Desa Tertinggal dan Subsidi BBM	Penentuan data-data desa tertinggal untuk subsidi BBM	Tipe LKMD atau lembaga yang setara, jalan utama, pola nafkah, pengusahaan lahan pertanian, jarak desa ke kecamatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, pasar, kepadatan penduduk, sumber air minum, wabah penyakit, pembuangan sampah, jamban, penerangan umum, tempat ibadah, pengusahaan ternak, kepemilikan TV dan telepon, serta rumah tangga pertanian.	Skoring pada tiap variabel
8	Yusuf Setiawan Bulu, SE (2002)	Krisis Moneter dan Kemiskinan di Sriharjo	Pembandingan dalam melihat bagaimana penduduk desa menanggulangi kemiskinan mereka	Mata pencarian, pendapatan, kelompok sosial yang terbentuk	Studi Komparatif
9	Ma'ruf, M.A. Fakultas ISIP Unsrat (2003)	Alternatif Kebijakan Pembangunan dan Tingkat Kemiskinan	Mengetahui sejauh mana tingkat kemiskinan informasi masyarakat di desa-desa pesisir	Kapasitas sumber daya manusia (penguasaan teknologi), tingkat pendidikan, tingkat pendapatan	Metode deskriptif, dengan melakukan pengamatan, wawancara dan angket untuk menyaksikan dan memperoleh data tentang kondisi desa dan penyebaran informasi di 3 desa pesisir
10	Andi Muhammad Sukri, S2 - Regional and City Planning (2007)	Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Selatan propinsi Sulawesi Selatan	Karakteristik Wilayah, aspirasi masyarakat dan kaitan program pembangunan	Pertimbangan tingkat pendapatan perkapita yang relatif rendah	Metode deskriptif

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode
11	Onesimus Warwer, Drs., M.Si (2001)	Partisipasi Masyarakat Miskin Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa melalui Inpres Desa Tertinggal di Aimas Sorong	Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat miskin di desa Aimas dalam pembangunan ekonomi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan ekonominya	Jenis kelompok masyarakat, pendapatan, jenis usaha-usaha produktif	Analisis data kualitatif dilakukan dengan secara cermat membandingkan data serupa dari berbagai sumber/informan; sedang data kuantitatif dianalisis dengan mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh sebagai pengaruh dari suntikan IDT Metode Deskriptif dengan kuisioner
12	Herman Supriadi, Endang Lestari, Dewa K. Sandra (puslitbang Sosek Pertanian,2004)	Pendasaran Sosial Ekonomi Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin di Kabupaten Blora	Identifikasi karakteristik desa di Kabupaten Blora	Prasarana sosial ekonomi, kelembagaan, mutu SDM, sistem produksi dan pemasaran, karakteristik rumah tangga petani	Metode Deskriptif dengan kuisioner

Sumber : Telaah penelitian-penelitian terdahulu, diolah

2.14. Kerangka Teori

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam setiap rumusan masalah dalam penelitian mengenai “Arahan Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo” dapat dilihat dalam kerangka teori (gambar 2.1).



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

